



Terkait Dugaan Korupsi Jembatan Pedamaran I dan II

Kadis PU dan Mantan Kadis PU Rohil Diperiksa

PEKANBARU,TRIBUN - Pemeriksaan lima pejabat dilingkungan Pemkab Rokan Hilir (Rohil) oleh Tim Penyelidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau terkait dugaan korupsi pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) hingga, Rabu (26/11) terus berlanjut.

Lima pejabat itu adalah Ibus Kasri mantan Kadis PU Rohil periode April 2009 sampai Januari 2012, Arsad mantan Kadis PU Rohil periode Desember 2008 sampai dengan April 2009. Lalu, Nasri Kadis PU Rohil periode 2012-2014 dan Marwan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tahun 2012 sampai 2014. Kemudian terakhir Plt Kadis PU Rohil Khaidir

yang saat itu selaku PPTK 2009 sampai 2011.

Informasi dirangkum ke lima pejabat Rohil itu diperiksa pertama sekali, Kamis (20/11) lalu dan mereka diperiksa masih sebagai saksi. Pantauan di Kejati hingga Rabu (26/11) ada beberapa pejabat Rohil itu masih diperiksa oleh pihak penyelidik Pidsus diantaranya Ibus Kasri dan lain-lain.

Ketika dikonfirmasi ke Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau Mukhzan SH terkait pemeriksaan itu, Rabu (26/11), Mukhzan membenarkan ada lima orang terkait dugaan korupsi jembatan Pedamaran I dan II di Rohil diperiksa. "Kelima itu diperiksa sebagai saksi, pemeriksaan yang dilakukan adalah peme-

riksaan lanjutan sebelumnya," ujar Mukhzan.

Dugaan korupsi pembangunan infrastruktur jembatan yang menggunakan dana dari APBD Rokan Hilir tahun anggaran 2008-2010 sebesar Rp529 miliar tersebut ditingkatkan ke penyelidikan pada Jumat (24/10) lalu.

Adanya dugaan korupsi tersebut kata Mukhzan, berdasarkan laporan yang disampaikan masyarakat. "Dalam laporan tersebut dinyatakan kalau proyek yang menggunakan dana APBD 2008-2010 tersebut dikurcurkan berdasarkan kesepakatan kontrak awal Nomor: 630/KONTRAK-JPI/MY/2008/47.80, dimana PT Waskita Karya menawarkan harga proyek itu sebesar

Rp422,48 miliar," ungkapnya.

Namun kenyataannya, anggaran yang turun lebih besar dari penawaran harga PT Waskita Karya, pengerjaan Jembatan Pedamaran I dan II 2008-2010 seharusnya sudah selesai 66,48 persen. Namun dari data lapangan pengerjaan pembuatan Pedamaran I baru 62,75 persen dengan dana Rp147,40 miliar. Dari dana itu kerugian negara mencapai Rp8,77 miliar.

Sedangkan untuk pembangunan Jembatan Pedamaran II, dana yang cair Rp156,42 miliar dengan bobot pengerjaan harus mencapai 68,18 persen, ternyata hasilnya baru 48,27 persen dengan jumlah dana Rp110,75 miliar sehingga negara dirugikan Rp45,67 miliar. (rsy)